

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kemiskinan

2.1.1 Definisi Kemiskinan

Menurut Bank Dunia (2006), kemiskinan adalah keadaan tidak tercapainya kehidupan yang layak dengan penghasilan USD 1,00 per hari.

Menurut BAPPENAS (2007), kemiskinan sebagai kondisi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar masyarakat desa antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki.

Kemiskinan menurut BPS (2008) dibagi menjadi 4 termologi yakni kemiskinan relatif, kemiskinan absolute, kemiskinan cultural dan kemiskinan struktural

1. Kemiskinan relatif

Merupakan kondisi miskin akibat pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Standar minimum disusun berdasarkan kondisi hidup suatu wilayah pada waktu tertentu dan perhatian terfokus pada golongan penduduk "termiskin", misalnya 20 persen atau 40 persen lapisan terendah dari total penduduk yang telah diurutkan menurut pendapatan/pengeluaran. Kelompok ini merupakan penduduk relatif miskin. Dengan demikian, ukuran kemiskinan relatif sangat tergantung pada distribusi pendapatan/pengeluaran penduduk

2. Kemiskinan absolut

Kemiskinan secara absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Kebutuhan pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal

dengan istilah garis kemiskinan. Penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin.

3. Kemiskinan Kultural

Pengertian kemiskinan kultural pada masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, tradisi dan kebiasaan yang cenderung mengarahkan masyarakat pada sikap apatis, pasrah pada nasib, boros dan bahkan tidak kreatif sekalipun ada bantuan dari pihak luar. Terbiasanya suatu kelompok dalam kondisi miskin yang memerangkapnya, tidak hanya disebabkan oleh sikap pasrah terhadap nasib tetapi dipengaruhi juga oleh budaya kemiskinan. Kemiskinan kultural tidak terjadi secara tiba-tiba tetapi disebabkan oleh proses perubahan sosial secara fundamental, seperti transisi dari budaya feodalisme kepada budaya kapitalisme.

4. Kemiskinan Struktural

kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi struktur atau tatanan kehidupan yang tidak menguntungkan. Kemiskinan dalam kondisi struktur demikian tidak disebabkan oleh faktor-faktor yang alami atau faktor-faktor pribadi dari orang miskin itu sendiri melainkan oleh sebab tatanan sosial yang tidak adil. Tatanan yang tidak adil ini menyebabkan banyak masyarakat gagal untuk mengakses sumber-sumber yang dibutuhkan untuk mengembangkan dirinya maupun untuk meningkatkan kualitas kehidupannya

2.1.2 Indikator Kemiskinan

Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar (*basic need approach*) untuk mengukur kemiskinan. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan kata lain, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun non makanan yang bersifat mendasar (BAPPENAS, 2010).

Indikator masyarakat miskin yang selama ini diterapkan oleh BPS antara lain yakni:

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang
2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.
3. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.

4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.
8. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari.
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik.
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah : Petani dengan luas lahan 0, 5 ha — Buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp 600.000 per bulan (2005) — atau pendapatan perkapita Rp.166.697 per kapita per bulan (2007).
13. Pendidikan tertinggi kepala kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya SD.
14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai Rp 500.000, seperti:sepeda motor (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya

Catatan:

Tidak semua indikator dipilih sebagai indikator kemiskinan untuk melakukan analisis SEM. Untuk mempermudah dilakukan pemilihan indikator dan penyederhanaan bahasa.

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini yakni:

- a. Kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar (Sandang, pangan, papan)
- b. Bantuan yang diterima masyarakat
- c. Pendapatan rumah tangga yang tidak mencukupi
- d. Tidak memperoleh sumber penerangan serta air bersih

2.2 Desa Miskin Tertinggal

2.2.1 Karakteristik Desa Miskin

Desa miskin adalah desa yang sebagian besar masyarakatnya tidak bisa produktif, tidak memiliki penghasilan leih baik, tidak bisa menabung dan tidak lebih bermartabat sehingga masyarakat desa tidak bisa meningkatkan status sosialnya.

Menurut Soemarno (2011) lokasi desa miskin pada umumnya jauh dari pusat-pusat pelayanan "Kota Kecamatan". Keterbatasan sarana dan prasarana perhubungan,

area yang luas, dan kondisi bentang lahan dengan topografi "berat" mengakibatkan transfer informasi, materi dan moneter antara desa dengan pusat pelayanan formal menjadi sangat terbatas. Pada umumnya transportasi antar desa dalam wilayah kecamatan masih sangat terbatas.

Sistem pendidikan masyarakat di wilayah pedesaan miskin secara fungsional dilayani oleh berbagai kelembagaan pendidikan formal dan nonformal. Peranan lembaga non-formal cenderung lebih besar dan mempunyai peluang untuk dikembangkan lebih jauh untuk dapat lebih mendukung program-program pembangunan masyarakat desa.

Menurut Soemarno (2011), umumnya penguasaan masyarakat pedesaan terhadap modal dan teknologi sangat terbatas. Mekanisme akumulasi modal hanya bertumpu kepada hasil produksi pertaniannya yang relatif rendah, akses terhadap fasilitas modal formal sangat terbatas atau bahkan tidak ada. Teknologi yang dikuasai berasal dari "warisan orang tua", sedangkan kegiatan transfer teknologi melalui agensi-agensi formal masih sangat terbatas. Peranan kelembagaan non-formal dan tokoh panutan non-formal lebih berperan dibandingkan dengan kelembagaan formal.

Sarana dan prasarana transportasi di wilayah pedesaan umumnya sangat terbatas, terutama untuk melayani hubungan antar desa, demikian juga hubungan dengan pusat kecamatan. Hubungan antara pusat kecamatan dengan pusat kota kabupaten umumnya telah memadai.

Catatan :

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah serta tinjauan literatur terkait karakteristik desa miskin, Desa Sidoharjo dikategorikan sebagai Desa Miskin. Hal ini dilihat dari sarana transportasi desa Sidoharjo yang terbatas serta jauhnya jarak desa ke pusat ibu kota Kecamatan Jambon. Daerah Desa Sidoharjo yang terisolir membuat kurangnya akses sarana prasarana formalnya yang ada di desa tersebut.

2.2.2 Faktor – Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kemiskinan Desa

Berdasarkan Penyusunan Program Pembangunan Bidang Permukiman Pada Desa Miskin Tertinggal di Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo 2011, aspek yang dilihat dalam karakteristik desa miskin dan tertinggal ini meliputi aksesibilitas, potensi kependudukan, kemampuan ekonomi wilayah serta ketersediaan sarana prasarana.

A. Aksesibilitas Desa

Aksesibilitas pada penelitian dibagi menjadi empat komponen yakni keberadaan alat transportasi umum, jarak desa ke pusat kegiatan, kondisi jalan serta ketersediaan hirarki jalan.

Menurut Soemarno (2011), Pada masyarakat desa, aktivitas biasanya dilakukan dengan berjalan kaki, walaupun tidak menutup kemungkinan melakukan aktivitas yang jauh dan membutuhkan sarana atau alat untuk menuju ke tempat aktivitas, antara lain sarana transportasi berupa mobil atau yang lain. Pada umumnya masyarakat desa mempunyai keterbatasan pada sarana transportasi/jalan raya. Tidak seperti di kota, jalan-jalan pada desa tidak semuanya berupa jalan beraspal tetapi berupa jalan tanah ataupun jalan batu, sehingga aktivitas masyarakat perdesaan umumnya lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat kota. Keterbatasan aksesibilitas berupa jalan raya dari masyarakat desa menimbulkan berbagai permasalahan antara lain :

1. Petani sulit meningkatkan penjualan surplus hasil pertanian ke pasar karena tidak dapat dijual atau kesulitan biaya transportasi
2. Produktivitas pertanian rendah dan kurangnya inovasi karena informasi dan input-input pertanian tidak dapat menjangkau para petani umumnya
3. Tingkat pendaftaran sekolah rendah dan ketidakhadiran tinggi (baik guru maupun murid). Anak-anak di daerah perdesaan pada umumnya malas meneruskan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi karena sulitnya sarana transportasi dan lingkungan yang tidak mendukung
4. Standar perawatan kesehatan rendah karena sulit menjangkau puskesmas dan tenaga kesehatan tidak dapat melakukan perjalanan dengan mudah.

keterbatasan dari aksesibilitas di perdesaan dapat menimbulkan masalah pada bidang-bidang lain diantaranya kesehatan dan pendidikan, lapangan pekerjaan, sumber air dan sumber bahan bakar yang akan memberi kontribusi pada tingkat kemiskinan masyarakat (Puspasari, 2000)

Menurut Puspasari (2002), permasalahan masyarakat desa untuk mempertahankan dan meningkatkan standar hidupnya adalah keterbatasan akses terhadap barang dan jasa utama seperti kesehatan, pendidikan, air, dan sumber-sumber alam lainnya, pasar dan kesempatan kerja.

Aksesibilitas merupakan faktor penentu dalam pembangunan perdesaan. Adapun bentuk kesuksesan program yang dirancang untuk memperbaiki kondisi kehidupan

penduduk miskin di perdesaan, akan sangat tergantung pada akses yang dimiliki terhadap berbagai fasilitas dan barang (Anonim, 2002).

Keterbatasan akses ke fasilitas kesehatan dan pendidikan, ke suplai air dan sumber bahan bakar akan memberi kontribusi pada tingkat kemiskinan masyarakat. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa kalau sebuah komunitas memiliki akses ke berbagai fasilitas, maka akan mempunyai kesempatan untuk keluar dari kemiskinan (Anonim, 2002).

B. Potensi Kependudukan

Pada penelitian ini, potensi kependudukan dibagi menjadi empat indikator yakni tingkat pendidikan masyarakat desa, laju pertumbuhan penduduk, tingkat harapan hidup, serta mata pencaharian masyarakat.

Desa-desa yang tertinggal sulit untuk ditingkatkan kesejahteraannya karena selain pembangunan yang selama ini distortif juga karena masyarakat pedesaan tersebut berada dalam posisi yang tidak menguntungkan; seperti pendidikan dan keterampilan yang rendah, tidak ada modal usaha, tidak punya tanah atau luasnya yang tidak layak dan lain-lain. Disamping itu masyarakat desa tersebut relatif terisolir dengan jumlah penduduk yang relatif jarang sehingga potensinya untuk berkembang menjadi terhambat (Syahza, 2002).

Pendidikan berkaitan erat dengan kemiskinan. Orang yang berpendidikan lebih baik cenderung memiliki tingkat pendapatan yang lebih baik pula. Karena orang yang berpendidikan tinggi memiliki peluang yang lebih baik untuk mendapatkan pekerjaan dengan tingkat upah yang lebih tinggi dibanding mereka yang berpendidikan rendah.

Dengan demikian orang yang memiliki tingkat pendidikan yang baik memiliki peluang yang lebih kecil untuk menjadi miskin dibanding mereka yang berpendidikan rendah. Untuk melihat kecenderungan tersebut, beberapa karakteristik pendidikan seperti rata-rata lamanya sekolah, kemampuan baca tulis, dan tingkat pendidikan yang ditamatkan kepala rumah tangga miskin (BPS 2008).

Salah satu indikator tingkat kesejahteraan rumah tangga adalah sumber penghasilan utama rumah tangga. Sumber penghasilan utama umumnya terkait erat dengan tingkat penghasilan. Misalnya penghasilan atau upah yang bersumber dari pekerjaan di sektor formal cenderung lebih tinggi dibandingkan upah yang bersumber dari pekerjaan di sektor informal (BPS 2008)..

Dengan demikian rumah tangga yang memiliki sumber penghasilan utama berasal dari sektor formal akan cenderung lebih sejahtera (dalam arti memiliki

penghasilan yang lebih tinggi) dibandingkan dengan rumah tangga yang sumber penghasilan utamanya berasal dari sektor informal. Dua karakteristik utama ketenagakerjaan yang diharapkan mampu menggambarkan perbedaan antara rumah tangga miskin dan rumah tangga tidak miskin berdasarkan ketersediaan data yang ada adalah lapangan usaha atau sektor dan jumlah jam kerja seminggu (BPS 2008).

Menurut Syahza (2002), Untuk mengatasi kesenjangan ini maka perlu dilakukan penanganan berupa program transmigrasi dan mobilitas penduduk yang memiliki seperangkat kegiatan, seperti: penataan ruang, penataan pemukiman penduduk, dan penyempurnaan sarana dan prasarana sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan. Beberapa dari daerah miskin ini sebenarnya memiliki sumberdaya alam yang cukup kaya tetapi masyarakat tidak mempunyai kesempatan untuk memanfaatkan kekayaan alam tersebut. Oleh karena itu dengan program pemberdayaan masyarakat desa tertinggal ini akan mengurangi ketimpangan pembangunan dan pendapatan antar daerah.

C. Kemampuan Ekonomi Wilayah

Kemampuan ekonomi wilayah dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yakni ekonomi wilayah dan ketersediaan fasilitas umum.

Keadaan sosial ekonomi masyarakat miskin di wilayah pedesaan masih ditandai oleh pertambahan penduduk yang cukup pesat, dan sebagian terbesar masih tergantung pada sektor pertanian dan sektor-sektor tradisional. Dalam situasi seperti ini tekanan terhadap sumberdaya lahan semakin besar dan rata-rata penguasaan aset lahan setiap rumah tangga semakin minim, bahkan banyak rumahtangga yang tidak memiliki lahan garapan. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi dampak keterbatasan lahan pertanian tersebut, baik melalui program intensifikasi pertanian, transmigrasi, maupun pengembangan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha dalam sektor non-pertanian di pedesaan. Sementara itu sejumlah penduduk pedesaan mengambil jalan pintas untuk menolong dirinya sendiri melalui urbanisasi ke kota. Penduduk yang tetap tinggal di desa harus bersedia hidup dalam situasi subsistensi dan involutif (Soemarno, 2011).

Menurut BPS (2008), faktor penyebab kemiskinan desa, umumnya bersumber dari sektor pertanian yang disebabkan ketimpangan kepemilikan lahan pertanian. Desa miskin pada umumnya bergantung pada sektor pertanian dan hasil hutan. Hal tersebut dapat menjadi masalah yang besar jika sektor pertanian dan hasil hutan produktifitasnya menurun, maka akan membuat pendapatan desa tersebut menurun pula, dan jika tidak

dapat segera bangkit akan semakin memperburuk kondisi ekonomi desa yang dapat menyebabkan desa menjadi miskin.

Pada masyarakat pedesaan tidak terdapat batasan yang tegas antara area ekonomi dan area sosial. Keduanya melekat dan saling melengkapi dalam satu kerangka identitas lokal. Jadi infrastruktur sosial dan infrastruktur ekonomi seringkali menyatu dalam satu struktur yang tidak begitu tegas. Kekuatan infrastruktur ekonomi akan secara otomatis meletakkan posisi status sosial pada struktur sosial. Kerana itulah jika pembangunan pedesaan didekati hanya dari satu aspek saja, maka akan mengganggu infrastruktur pedesaan yang sudah ada dan biasanya akan mengalami hambatan dalam proses pencapaian tujuan program. Pemahaman sosial-ekonomi pedesaan bisa dengan mudah dipahami melalui identifikasi pemikiran ekonomi yang berkembang ditengah-tengah masyarakat.

Pendekatan kebutuhan dasar, melihat kemiskinan sebagai suatu ketidakmampuan (*lack of capabilities*) seseorang, keluarga dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan minimum, antara lain pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, penyediaan air bersih dan sanitasi. Menurut pendekatan pendapatan, kemiskinan disebabkan oleh rendahnya penguasaan asset, dan alat-alat produktif seperti tanah dan lahan pertanian atau perkebunan, sehingga secara langsung mempengaruhi pendapatan seseorang dalam masyarakat. Pendekatan ini, menentukan secara tegas standar pendapatan seseorang di dalam masyarakat untuk membedakan kelas sosialnya. Pendekatan kemampuan dasar menilai kemiskinan sebagai keterbatasan kemampuan dasar seperti kemampuan membaca dan menulis untuk menjalankan fungsi minimal dalam masyarakat. Keterbatasan kemampuan ini menyebabkan tertutupnya kemungkinan bagi orang miskin terlibat dalam pengambilan keputusan. Pendekatan obyektif atau sering juga disebut sebagai pendekatan kesejahteraan (*the welfare approach*) menekankan pada penilaian normatif dan syarat yang harus dipenuhi agar keluar dari kemiskinan. Pendekatan subyektif menilai kemiskinan berdasarkan pendapat atau pandangan orang miskin sendiri.

D. Ketersediaan Sarana prasarana

Kimiskinan dapat dilihat dari berbagai aspek, salah satunya yakni ketersediaan sarana prasarana. Dari aspek ini, kemiskinan dipandang sebagai rendahnya akses terhadap berbagai sarana prasarana (World Bank, 2006)

Keberadaan lingkungan perumahan yang sehat dan layak huni diharapkan akan memacu peningkatan kualitas hidup masyarakat. *Backlog* (kebutuhan) perumahan

didasarkan pada asumsi setiap keluarga paling tidak mampu menempati satu rumah untuk menjamin kehidupan mereka. Perkembangan atau peningkatan jumlah kebutuhan perumahan akan terus terjadi seiring dengan peningkatan jumlah penduduk yang tinggal pada suatu kawasan.

Jaringan jalan diperlukan untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah serta menunjang pergerakan masyarakat dari dan menuju wilayah yang bersangkutan. Ketersediaan jaringan jalan pada wilayah desa miskin tertinggal diharapkan mampu meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat sehingga pada akhirnya mampu memacu tingkat kesejahteraan masyarakat (Soemarno, 2011).

Berdasarkan Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Bidang Permukiman Pada Desa Miskin Tertinggal di Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo 2011, air bersih merupakan salah satu kebutuhan utama manusia untuk menunjang kelangsungan hidupnya. Air bersih diperlukan untuk menunjang berbagai aktivitas oleh penduduk pada wilayah studi seperti masak, minum, mandi, mencuci, kakus dan lainnya.

Menurut McLuhan dalam Abrar (1997) jika masyarakat pedesaan ingin memperoleh kemajuan atau perubahan tentang suatu peristiwa, mau tidak mau masyarakat harus memilih untuk menggunakan teknologi telekomunikasi. Peranan telekomunikasi pada masyarakat pedesaan dapat diketahui dari adanya manfaat dan dampak yang diberikan. Peranan itu meliputi semua aspek yaitu aspek sosial-ekonomi, sosialpsikologis, dan sosial-budaya. Telekomunikasi berperan penting dalam aspek sosial-ekonomi dari pada aspek yang lain, dimana telekomunikasi berperan sebagai penunjang usaha peningkatan produksi daerah, membuka akses yang lebih luas dalam hubungan ekonomi dengan daerah lain, menambah ramai suasana pasar, meningkatkan perhatian orang luar terhadap daerah tersebut termasuk investor, serta meningkatkan nilai rumah dan tanah. Semua itu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan karena ditunjang oleh kemudahan dalam melakukan aktivitas ekonomi dengan menggunakan telekomunikasi. Menurut Suprpto (2009), bawa komunikasi merupakan kebutuhan utama dalam melakukan interaksi sosial dimana 90 persen dari kehidupan manusia sehari-hari merupakan komunikasi.

Catatan:

Indikator diatas digunakan sebagai penunjang dalam analisis SEM untuk permodelan hubungan indikator kemiskinan desa Sidoharjo. Setiap indikator memiliki keterkaitan yang disesuaikan dengan kondisi kemiskinan di Desa Sidoharjo.

2.3 Program Penanggulangan Kemiskinan

Berdasarkan Keputusan Presiden no.15 Tahun 2010, Penanggulangan Kemiskinan merupakan kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil (Kepres no. 15 Tahun 2010).

2.3.1 Karakteristik Bantuan/Program

Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika (2011) pemerintah telah menetapkan tiga jalur strategi pembangunan, yaitu:

1. Pro-Pertumbuhan (*pro-growth*), untuk meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan 17 *Program Pengentasan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II* ekonomi melalui investasi, sehingga diperlukan perbaikan iklim investasi, melalui peningkatan kualitas pengeluaran pemerintah, melalui ekspor, dan peningkatan konsumsi;
2. Pro-Lapangan Kerja (*pro-job*), agar pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya dengan menekankan pada investasi padat pekerja;
3. Pro-Masyarakat Miskin (*pro-poor*), agar pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi jumlah penduduk miskin sebesar-besarnya dengan penyempurnaan sistem perlindungan sosial, meningkatkan akses kepada pelayanan dasar, dan melakukan pemberdayaan masyarakat.

Tabel 2.1 Instrumen program percepatan penanggulangan kemiskinan

Klaster	Muatan	Tujuan
Klaster I	Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga,	bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar dan pengurangan beban hidup masyarakat perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin dengan memberikan akses termasuk akses sarana prasana
Klaster II	Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat	bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
Klaster III	Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil	bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil;

Sumber: PERPRES No. 15 Tahun 2010

Berdasarkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (2011), bantuan dibagi menjadi tiga klaster dengan penjabaran program sebagai berikut

A. Program-program Penanggulangan Kemiskinan Klaster I

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

PKH adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga RTS diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Program ini, dalam jangka pendek bertujuan mengurangi beban RTSM dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan

2. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Tujuan umum program BOS untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar sembilan tahun yang bermutu. Sasaran program BOS adalah semua siswa (peserta didik) di jenjang Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsyanawiyah (MTs), termasuk Sekolah Menengah Terbuka (SMPT) dan Pusat Kegiatan Belajar Mandiri (PKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia.

3. Program Bantuan Siswa Miskin (BSM)

Kebijakan Bantuan Siswa Miskin (BSM) bertujuan agar siswa dari kalangan tidak mampu dapat terus melanjutkan pendidikan di sekolah. Program ini bersifat bantuan bukan beasiswa, karena jika beasiswa bukan berdasarkan kemiskinan, melainkan prestasi.

4. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS)

Jamkesmas adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan hampir miskin. Tujuan Jamkesmas adalah meningkatkan akses terhadap masyarakat miskin dan hampir miskin agar dapat memperoleh pelayanan kesehatan.

5. Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN)

Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras dan mencegah penurunan konsumsi energi dan protein. Selain itu raskin bertujuan untuk meningkatkan/membuka akses pangan keluarga melalui

penjualan beras kepada keluarga penerima manfaat dengan jumlah yang telah ditentukan.

6. Program-program lainnya yang baik secara langsung dan tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin

B. Program-program Penanggulangan Kemiskinan Klaster II

1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

- a. PNPM Mandiri Perdesaan
- b. PNPM Perdesaan R2PN (Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pulau Nias)
- c. PNPM Mandiri Agribisnis/SADI (*Smallholder Agribusiness Development Initiative*)
- d. PNPM Generasi Sehat Dan Cerdas
- e. PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan (PNPM-LMP)
- f. Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (P2SPP)
- g. PNPM Mandiri Respek (Rencana Strategis Pengembangan Kampung) Bagi Masyarakat Papua
- h. PNPM Mandiri Perkotaan
- i. PNPM Mandiri Infrastruktur Perdesaan
- j. Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW)

Tujuan pelaksanaan PISEW adalah mempercepat pembangunan sosial ekonomi masyarakat yang berbasis sumberdaya lokal, mengurangi kesenjangan antarwilayah, pengentasan kemiskinan daerah perdesaan, memperbaiki pengelolaan pemerintahan (*local governance*) dan penguatan institusi di perdesaan Indonesia.

- k. Program Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)
 1. PNPM-Mandiri Daerah Tertinggal Dan Khusus/Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Khusus (P2DTK)
 - m. PNPM Mandiri Kelautan Dan Perikanan (PNPM Mandiri-KP)
 - n. PNPM-Mandiri Pariwisata
 - o. PNPM-Mandiri Perumahan dan Permukiman (PNPM-Mandiri Perkim)

2. Program Perluasan Dan Pengembangan Kesempatan Kerja/Padat Karya Produktif .

C. Program-program Penanggulangan Kemiskinan Klaster III

1. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Bantuan berupa fasilitas pinjaman modal ini adalah untuk meningkatkan akses pembiayaan perbankan yang sebelumnya hanya terbatas pada usaha berskala besar dan kurang menjangkau pelaku usaha mikro kecil dan menengah seperti usaha rumah tangga dan jenis usaha mikro lain yang bersifat informal, mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM

2. Kredit Usaha Bersama (KUBE)

Sasaran program KUBE adalah keluarga miskin produktif (orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan; Keluarga Miskin yang mengalami penurunan pendapatan dan kesejahteraannya atau mengalami penghentian penghasilan

Catatan:

Pengklasifikasian bantuan diatas digunakan untuk mempermudah identifikasi karakteristik bantuan di Desa Sidoharjo.

2.3.2 Kelembagaan

Menurut Soemarno (2011), kelembagaan formal penunjang pembangunan yang ada di pedesaan umumnya belum mampu berkiprah secara memadai, berbagai kendala dan keterbatasan senantiasa dihadapi oleh kelembagaan formal untuk dapat menggalang partisipasi masyarakat pedesaan. Pada umumnya lembaga non-formal, seperti kelompok arisan, kelompok pengajian dan pondok-pesantren lebih mampu menggalang partisipasi dan keswadayaan masyarakat pedesaan.

Kelembagaan sosial-ekonomi formal di pedesaan umumnya belum dapat menjangkau kepentingan kelompok masyarakat miskin, karena adanya berbagai persyaratan birokrasi dan agunan yang rumit. Hal ini mendorong berkembangnya berbagai bentuk kelembagaan non-formal di kalangan masyarakat dengan tokoh panutannya masing-masing. Lembaga keuangan pedesaan non-formal (pelepas uang, pedagang) umumnya lebih mampu menjangkau kelompok masyarakat miskin dengan berbagai kemudahan pelayanannya (Soenarnom, 2011).

Catatan:

Identifikasi kelembagaan digunakan untuk mengetahui fungsi kelembagaan di Desa Sidoharjo serta peran lembaga dalam mengelola bantuan serta pihak-pihak yang terlibat

dalam kelembagaan. Pada Desa Sidoharjo, kelembagaan dibagi menjadi dua bentuk yakni kelembagaan formal dan non formal.

2.4 Tinjauan Analisis

2.4.1 Analisis Kelembagaan (Diagram Venn)

Diagram venn merupakan teknik yang bermanfaat untuk melihat hubungan masyarakat dengan berbagai lembaga yang terdapat di desa (dan lingkungannya). Diagram venn memfasilitasi diskusi masyarakat untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang berkaitan secara langsung maupun tak langsung terhadap permasalahan yang dihadapi, serta menganalisa dan mengkaji perannya, kepentingannya untuk masyarakat dan manfaat untuk masyarakat. Di sisi lain Diagram Venn merupakan salah satu cara untuk menggambarkan hubungan antara suatu lembaga dengan lembaga lain dalam suatu daerah atau suatu proyek. Diagram venn ini menggunakan lingkaran-lingkaran untuk menggambarkan lembaga. Ukuran lingkaran menggambarkan besarnya pengaruh lembaga. Posisi lingkaran relatif ke batas menggambarkan lembaga tersebut di dalam atau di luar masyarakat. Kegiatan ini dilakukan oleh masyarakat yang mengerti hubungan antar lembaga dalam masyarakat (Kris, 2007).

Berikut langkah-langkah pembuatan diagram Venn (Kris, 2007):

1. melakukan pembahasan bersama kelompok-kelompok masyarakat secara partisipatif mengenai keberadaan kelembagaan di desa;
2. mencatat daftar lembaga-lembaga pada flipchart;
3. membuat kesepakatan mengenai simbol-simbol yang dipergunakan (misalnya: besarnya lingkaran menunjukkan pentingnya lembaga-lembaga tersebut menurut pemahaman masyarakat. Semakin penting suatu lembaga maka semakin besar lingkaran atau jarak dari tingkatan masyarakat menunjukkan manfaat lembaga tersebut menurut pemahaman masyarakat. Semakin dekat dengan lingkaran masyarakat maka lembaga tersebut semakin);
4. menulis kesepakatan simbol-simbol tersebut pada flipchart agar mudah diingat oleh masyarakat;
5. membahas apakah lembaga-lembaga tersebut 'penting' menurut pemahaman masyarakat dan menyepakati besarnya lingkaran yang mewakili lembaga tersebut ;

6. melakukan pembahasan mengenai bagaimana manfaat lembaga tersebut terhadap masyarakat yang ditunjukkan oleh jaraknya dari lingkaran masyarakat.

2.4.2 Analisis Structural Equation Modeling (SEM)

A. Pengertian

Menurut Santoso (2011), *Structural Equation Modeling* (SEM) merupakan teknik analisis multivariat yang dikembangkan guna menutupi keterbatasan yang dimiliki oleh model-model analisis sebelumnya yang telah digunakan secara luas dalam penelitian statistik. Model-model yang dimaksud diantaranya adalah *regression analysis* (analisis regresi), *path analysis* (analisis jalur), dan *confirmatory factor analysis* (analisis faktor konfirmatori)

Analisis regresi menganalisis pengaruh satu atau beberapa variabel bebas terhadap variabel terikat. Analisis pengaruh tidak dapat diselesaikan menggunakan analisis regresi ketika melibatkan beberapa variabel bebas, variabel antara, dan variabel terikat. Penyelesaian kasus yang melibatkan ketiga variabel tersebut dapat digunakan analisis jalur. Analisis jalur dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung, dan pengaruh total suatu variabel bebas terhadap variabel terikat (Ghozali, 2011).

Analisis lebih bertambah kompleks lagi ketika melibatkan *latent variable* (variabel laten) yang dibentuk oleh satu atau beberapa indikator *observed variables* (variabel terukur/teramati). Analisis variabel laten dapat dilakukan dengan menggunakan analisis faktor, dalam hal ini analisis faktor konfirmatori (*confirmatory factor analysis*). Analisis pengaruh semakin bertambah kompleks lagi ketika melibatkan beberapa variabel laten dan variabel terukur langsung. Pada kasus demikian, teknik analisis yang lebih tepat digunakan adalah pemodelan persamaan struktural (*Structural Equation Modeling*). SEM merupakan teknik analisis multivariat generasi kedua, yang menggabungkan model pengukuran (analisis faktor konfirmatori) dengan model struktural (analisis regresi, analisis jalur) (Ghozali, 2011).

Dengan menggunakan SEM, peneliti dapat mempelajari hubungan struktural yang diekspresikan oleh seperangkat persamaan, yang serupa dengan seperangkat persamaan regresi berganda. Persamaan ini akan menggambarkan hubungan diantara konstruk (terdiri dari variabel dependen dan independen) yang terlibat dalam sebuah analisis. Hingga saat ini, teknik multivariabel diklasifikasikan sebagai teknik interdependensi atau dependensi. SEM dapat dikategorikan sebagai kombinasi yang unik dari kedua hal

tersebut karena dasar dari SEM berada pada dua teknik multivariabel yang utama, yaitu analisis faktor dan analisis regresi berganda (Santoso, 2011).

B. Pemodelan SEM

Diagram lintasan (*path diagram*) dalam SEM digunakan untuk menggambarkan atau mespesifikasikan model SEM dengan lebih jelas dan mudah, jika dibandingkan dengan model persamaan matematik. Untuk dapat menggambarkan diagram jalur sebuah persamaan secara tepat, perlu diketahui tentang variabel-variabel dalam SEM beserta notasi dan simbol yang berkaitan. Kemudian hubungan diantara model-model tersebut dituangkan dalam model persamaan struktural dan model pengukuran.

Variabel-variabel dalam SEM (Santoso, 2011):

1. Variabel laten (*latent variable*)

Variabel laten merupakan konsep abstrak, misalkan : perilaku, perasaan, dan motivasi. Variabel laten ini hanya dapat diamati secara tidak langsung dan tidak sempurna melalui efeknya pada variabel teramati. Variabel laten dibedakan menjadi dua yaitu variabel eksogen dan endogen. Variabel eksogen setara dengan variabel bebas, sedangkan variabel endogen setara dengan variabel terikat. Notasi matematik dari variabel laten eksogen adalah ξ ("ksi") dan variabel laten endogen ditandai dengan η (eta).



Gambar 2.1 Simbol Variabel Laten

2. Variabel teramati (*observed variable*) atau variabel terukur (*measured variable*)

Variabel teramati adalah variabel yang dapat diamati atau dapat diukur secara empiris dan sering disebut sebagai indikator. (Efferin, 2008 : 11). Variabel teramati merupakan efek atau ukuran dari variabel laten. Pada metoda penelitian survei dengan menggunakan kuesioner, setiap pertanyaan pada kuesioner mewakili sebuah variabel teramati. Variabel teramati yang berkaitan atau merupakan efek dari variabel laten eksogen diberi notasi matematik dengan label X, sedangkan yang berkaitan dengan variabel laten endogen diberi label Y. Simbol diagram lintasan dari variabel teramati adalah bujur sangkar atau empat persegi panjang.



Gambar 2.2 Simbol Variabel Teramati

SEM memiliki dua elemen atau model, yaitu model struktural dan model pengukuran.

1. Model Struktural (*Structural Model*)

Model ini menggambarkan hubungan diantara variabel-variabel laten. Parameter yang menunjukkan regresi variabel laten endogen pada eksogen dinotasikan dengan γ ("gamma"). Sedangkan untuk regresi variabel endogen pada variabel endogen lainnya dinotasikan dengan β ("beta"). Variabel laten eksogen juga boleh berhubungan dalam dua arah (*covary*) dengan dinotasikan ϕ ("phi"). Notasi untuk *error* adalah ξ (zeta).

2. Model Pengukuran (*Measurement Model*)

Setiap variabel laten mempunyai beberapa ukuran atau variabel teramati atau indikator. Variabel laten dihubungkan dengan variabel-variabel teramati melalui model pengukuran yang berbentuk analisis faktor. Setiap variabel laten dimodelkan sebagai sebuah faktor yang mendasari variabel-variabel terkait. Muatan faktor (*factor loading*) yang menghubungkan variabel laten dengan variabel teramati diberi label λ ("lamnda"). Error dalam model pengukuran dinotasikan dengan ξ (zeta) ξ .

C. Langkah analisis SEM

Berikut merupakan langkah-langkah pengerjaan analisis SEM menggunakan software AMOS (Ghozali, 2011)

1. Pengembangan model berdasarkan teori

Tujuannya adalah untuk mengembangkan model yang mempunyai justifikasi (pembenaran) secara teoritis yang kuat untuk mendukung upaya analisis terhadap suatu masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini pengembangan teori yakni mengkaitkan hubungan variabel kemiskinan berdasarkan literature yang ada.

2. Pengembangan diagram lintasan (path diagram)

Tujuannya adalah menggambarkan model teoritis yang telah dibangun pada langkah pertama (pengembangan model) kedalam sebuah diagram jalur agar peneliti dengan mudah dapat mencermati hubungan kausalitas yang ingin diujinya.

3. Mengkonversi diagram jalur kedalam persamaan struktural

Langkah ini membentuk persamaan-persamaan pada model struktural dan model pengukuran; Model structural dibentuk bersarkan kaitan variabel kamiskinan Desa Sidoharjo.



Gambar 2.3 (a) model struktural SEM dan (b) Model Pengukuran SEM

Persamaan dalam model struktural dibangun dengan persamaan :

Var laten endogen = β var laten endogen + γ var laten eksogen + error
sehingga untuk persamaan matematik untuk model struktural diatas adalah :

$$\begin{aligned}\eta_1 &= \beta_{12}\eta_2 + \gamma_{11}\xi_1 + \gamma_{12}\xi_2 + \zeta_1 \\ \eta_2 &= \beta_{21}\eta_1 + \gamma_{21}\xi_1 + \gamma_{22}\xi_3 + \zeta_2\end{aligned}$$

dengan persamaan dalam bentuk matriks :

$$\begin{bmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \beta_{12} \\ \beta_{21} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \gamma_{11} & \gamma_{12} & 0 \\ \gamma_{21} & 0 & \gamma_{23} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \\ \xi_3 \end{bmatrix}$$

Persamaan dalam model pengukuran dibangun dengan persamaan :

Indikator = γ konstruk + error

$$X = \gamma \text{ var laten eksogen} + \text{error}$$

$$Y = \gamma \text{ var laten endogen} + \text{error}$$

sehingga untuk persamaan matematik untuk model struktural diatas

$$\begin{aligned}x_1 &= \xi_1 + \delta_1 \\ x_2 &= \lambda_{21}^{(x)}\xi_1 + \delta_2 \\ x_3 &= \lambda_{31}^{(x)}\xi_1 + \lambda_{32}^{(x)}\xi_2 + \delta_3\end{aligned}$$

Dengan persamaan dalam bentuk matriks :

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \lambda_{21}^{(x)} & 0 & 0 \\ \lambda_{31}^{(x)} & \lambda_{32}^{(x)} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \\ \xi_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \delta_1 \\ \delta_2 \\ \delta_3 \end{bmatrix}$$

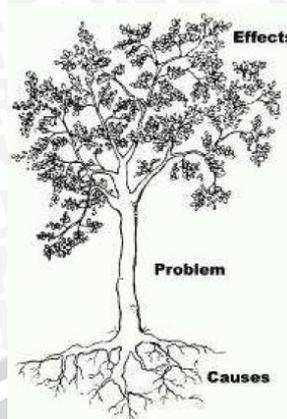
4. Pemilihan data input dan teknik estimasi
Tujuannya adalah menetapkan data input yang digunakan dalam pemodelan dan teknik estimasi model. Data input berdasarkan pada pemodelan dimana isi data input dari hasil pengamatan dilapangan (Desa Sidoharjo) terkait dengan variabel kemiskinan
5. Evaluasi masalah identifikasi model
Tujuannya adalah untuk mendeteksi ada tidaknya masalah identifikasi berdasarkan evaluasi terhadap hasil estimasi yang dilakukan program komputer
6. Evaluasi Asumsi dan Kesesuaian model
Tujuannya adalah untuk mengevaluasi pemenuhan asumsi yang disyaratkan SEM, dan kesesuaian model berdasarkan kriteria *goodness-of-fit tertentu*.
7. Interpretasi dan modifikasi model
Tujuannya adalah untuk memutuskan bentuk perlakuan lanjutan setelah dilakukan evaluasi asumsi dan uji kesesuaian model.

2.4.3 Analisis Akar Masalah

Menurut Mikkelsen (2011), teknik ini disebut sebagai analisa akar masalah karena melalui teknik ini, dapat melihat 'akar' dari suatu masalah, dan kalau sudah dilaksanakan, hasil dari teknik ini kadang-kadang mirip pohon dengan akar banyak. Analisa Akar Masalah sering dipakai dengan masyarakat sebab sangat visual dan dapat melibatkan banyak orang dengan waktu yang sama. Teknik ini dapat dipakai dengan situasi yang berbeda, tapi lebih penting dari itu, dapat dipakai dimana saja ada masalah tetapi penyebab masalah tersebut kurang jelas. Boleh dipakai di kantor, dan juga di lapangan - teknik ini adalah teknik yang cukup fleksibel.

Melalui metode akar masalah, orang yang terlibat dalam hal memecahkan satu masalah dapat melihat penyebab yang sebenarnya, yang mungkin belum bisa dilihat kalau masalah hanya dapat dilihat secara pintas. Teknik Analisa Akar Masalah dapat melibatkan orang setempat yang tahu secara mendalam masalah yang ada.

Masalah utama dalam suatu penelitian seringkali bersifat kompleks sehingga tidak dapat dipecahkan dengan solusi tunggal karena masalah biasanya disebabkan oleh beberapa penyebab hingga sampai pada akar permasalahan. Setiap akar permasalahan lebih mudah dicari solusinya sehingga tujuan dari analisis akar masalah untuk menentukan solusi melalui pencarian akar masalah (Mikkelsen, 2011).

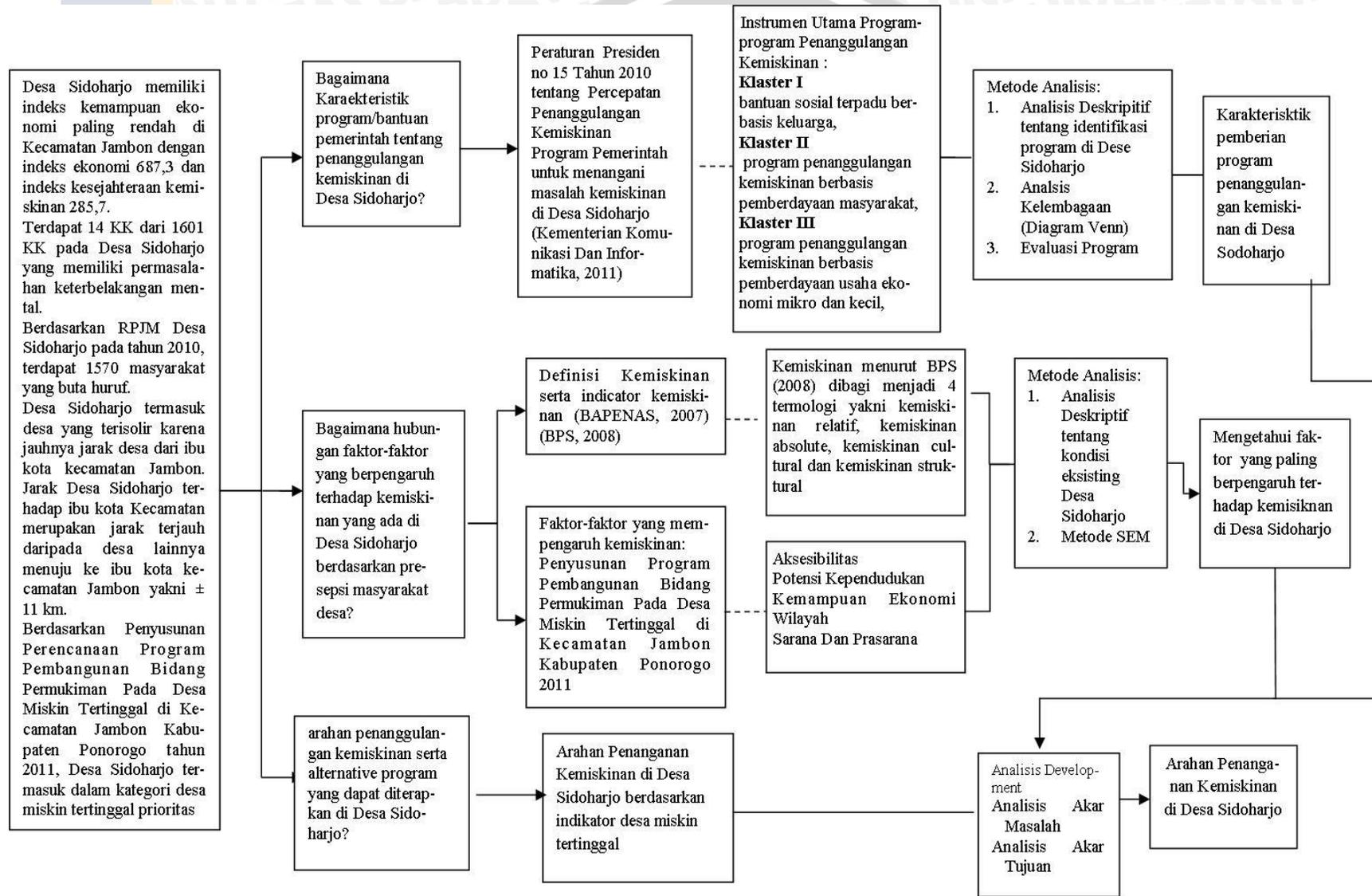


Gambar 2.4 analisis pohon masalah atau akar masalah

2.4.4 Akar Tujuan

Analisis tujuan digunakan untuk menentukan tujuan-tujuan yang ingin dicapai guna menyelesaikan permasalahan. Analisis tujuan merupakan kebalikan dari analisis masalah, sehingga permasalahan yang ada menjadi teratasi dengan adanya tujuan dalam analisis tujuan. Analisis tujuan juga bisa disebut sebagai analisis Jembatan Bambu. Dikatakan sebagai jembatan bambu dapat menggambarkan masalah yang sedang dihadapi dan tujuan yang akan dicapai serta tahapan yang harus ditempuh. Analisis ini sangat mudah dipahami karena analisis ini dilakukan secara visual dan sistematis. Hasil yang telah dicapai dapat digunakan untuk proses perencanaan ((Mikkelsen, 2011).

2.5 Kerangka Teori



Gambar 2.5 Kerangka teori

2.6 Studi Terdahulu

Tabel 2.2 Studi Terdahulu

No.	Judul Penelitian / Peneliti	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Penyusunan Program Pembangunan Bidang Permukiman Pada Desa Miskin Tertinggal di Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo (PU Prov Jawa Timur 2011)	- Kondisi aksesibilitas desa - Potensi kependudukan desa - Kemampuan ekonomi wilayah desa - Ketersediaan sarana dan prasarana	- Analisis Deskriptif - Analisis indeks	• Penentuan Tingkat prioritas Desa Miskin tertinggal dimana berdasarkan hasil perhitungan indeks Desa Sidoharjo sebagai ditentukan sebagai desa miskin tertinggal prioritas	Perbedaan pada penelitian ini adalah Pada hasil penelitian tersebut Desa Sidoharjo ditentukan sebagai desa miskin tertinggal priotitas, sedangkan penelitian ini menentukan variabel mana yang menjadi pengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Desa Sidoharjo
2	Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian ekonomi tentang kemiskinan di Perdesaan propinsi sumatera barat (Oleh Syamsul Amar, 2002)	- Luas Lahan - Teknologi telekomunikasi - Pendidikan - Kesehatan - Aksesibilitas	- <i>Multiple Logistic Regression, Chi Square, Wald Test, Odds Ratio dan Pooled Variace t-Model.</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel luas penguasaan lahan; tingkat teknologi; tingkat pendidikan; tingkat kesehatan; aksesibilitas terhadap kelembagaan; mata pencaharian alternatif, secara simultan berpengaruh sangat signifikan terhadap kemiskinan rumah tangga. Temuan tersebut konsisten dengan hasil penelitian	Perbedaan pada penelitian yakni lokasin dan metode analisis. Selain itu ada beberapa variabel yang digunakan dan ada beberapa variabel yang tidak sama.
2	<i>Structural equation modeling</i> Pada perhitungan indeks kepuasan pelanggan Dengan menggunakan software amos (studi kasus: perhitungan indeks kepuasan mahasiswa fmipa uny Terhadap operator im3) (Oleh: Albertin Yunita Nawangsari, 2011)	- <i>Satisfaction toward quality</i> - <i>satisfaction toward value</i> - <i>perceived best</i> - <i>Customer satisfaction</i>	- <i>Structural Equation Modeling (SEM)</i>	Hasil penelitian: Dari perhitungan diperoleh indeks kepuasan mahasiswa FMIPA UNY terhadap operator IM3 sebesar 77,75%. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa FMIPA UNY secara keseluruhan telah puas terhadap operator IM3 yang selama ini mereka gunakan	Persamaan dalam penelitian ini adalah metode yang digunakan. Perbedaan pada penelitian yakni lokasi, variabel, dan materi pembahasan